



## Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam

**Syukron Darsyah**

STAI Nurul Hidayah Selatpanjang

Email : [syukron@stai-nh.ac.id](mailto:syukron@stai-nh.ac.id)

### Abstrak

Brunei merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang paling kaya dan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah. Potensi itu belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Kurikulum merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya sistem pendidikan dalam sebuah negara atau pemerintahan. Artikel ini mencoba membahas tentang sejauh mana kebijakan pemerintah Brunei terhadap Kurikulum Pendidikan Islam dan implikasinya bagi kemajuan pendidikan di Brunei Darussalam. Penulisan ini menggunakan metode literature review yang berusaha menceritakan tentang ulasan, rangkuman dan pemikiran tulisan dari berbagai sumber kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Brunei Darussalam terhadap Kurikulum Pendidikan Islam harus berpatokan dan berlandaskan pada 3 (Tiga) bidang utama berlaku di Brunei Darussalam yaitu sistem dwi bahasa di semua sekolah, konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah dan peningkatan serta pengembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasi (Kejuruan). Penulis juga menginventarisir Sistem Kurikulum pendidikan di Brunei yang dimulai dari Dasar Pendidikan 1954, Dasar Pendidikan Negara 1962, Dasar Pendidikan 1972 dan Dasar Dwibahasa 1984, Dasar Pendidikan 2002 dan Sistem Pendidikan Negara Abad ke- 21 atau SPN21 2009 yang menjadi pijakan utama dalam pengelolaan Pendidikan Islam di Brunei Darussalam menuju sistem yang unggul dan terintegrasi. Penulis juga menyimpulkan bahwa Pemerintah Brunei harus mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan pendanaan yang melimpah untuk bisa mengelola dan mengembangkan kurikulum pendidikan Islam menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Komitmen dan *political will* dari pemerintah Brunei Darussalam juga harus menjadi perhatian dalam pengelolaan kurikulum pendidikan islam dan pendidikan Islam secara umum di Brunei Darussalam.

**Kata Kunci** : *Brunei, Kurikulum, Pendidikan Islam, Kebijakan*

### Abstract

Brunei is one of the richest countries in the Southeast Asian region and has abundant natural resource potential. That potential has not been fully exploited for the world of education. The curriculum is very important for the running of the education system in a country or government. This article tries to discuss the extent of the Brunei government's policy towards the Islamic Education Curriculum and its implications for the advancement of education in Brunei Darussalam. This writing uses the literature review method which seeks to tell about reviews, summaries and writing thoughts from various sources of literature. The author concludes that the Government of Brunei Darussalam's policy towards the Islamic Education Curriculum must be based on and based on 3 (three) main areas applicable in Brunei Darussalam, namely the bilingual system in all schools, the concept of Malay Islam Beraja (MIB) in the school curriculum and improvement and development of human resources. including vocational education (Vocational). The author also takes an inventory of the educational curriculum system in Brunei which starts from the 1954 Basic Education, the 1962 State Education Basic, the 1972 Basic Education and the Bilingual Basic 1984, the 2002 Basic Education and the 21st Century State Education System or SPN21 2009 which is the main foundation in the management of Islamic Education in Brunei Darussalam towards a superior and integrated system. The author also concludes that the Government of Brunei must be able to optimize the potential of natural resources and

abundant funding to be able to better manage and develop an Islamic education curriculum. In addition, the commitment and political will of the government of Brunei Darussalam must also be a concern in managing the Islamic education curriculum and Islamic education in general in Brunei Darussalam.

**Keywords :** *Brunei, Curriculum, Islamic Education, Policy*

## **PENDAHULUAN**

Kurikulum merupakan hal yang penting dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan disemua jenjang dan institusi pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Sisdiknas : Bab I Pasal 1 ayat 19).

Brunei Darussalam merupakan Negara di Asia Tenggara dengan bentuk pemerintahan yang monarki absolut dan berdasarkan hukum Islam. Sistem pemerintahannya dipimpin oleh Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara. Selain itu, Sultan juga merangkap Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Brunei Darussalam juga dikenal sebagai negara yang kaya dengan Sumber Daya Alam sehingga mampu mensejahterakan rakyatnya dengan baik. Seluruh program pendidikan di Brunei Darussalam didasarkan pada kurikulum yang mengatur sistem pendidikan di negara tersebut. Kurikulum yang ada diarahkan untuk membentuk manusia yang berakhlak dan beragama serta menguasai teknologi. Pemerintah menetapkan tiga fokus utama dalam pendidikan yaitu Sistem dwi bahasa disemua sekolah, Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah dan peningkatan dan perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasional atau kejuruan (Maunah, 2011). Tiga bidang utama tersebut menjadi alas atau pijakan Pemerintah dalam mengelola sistem pendidikan di Brunei Darussalam.

Kajian tentang Brunei Darussalam terutama yang membicarakan tentang pendidikan sudah sangat banyak. Penulis mencatat diantaranya adalah Suddin Bani (2008) yang membahas mengenai perkembangan pendidikan Islam di Brunei Darussalam secara umum dan tidak spesifik kepada kebijakan kurikulum pendidikannya. Selanjutnya juga ada Haji Awg Asbol bin Haji Mail (2006) yang membahas tentang Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei khususnya antara Tahun 1950 s.d 1985. Banyak lagi tulisan-tulisan dalam jurnal, buku dan makalah yang membahas tentang Brunei Darussalam dan pendidikannya secara umum.

Dalam penulisan artikel ini, fokus utama pembahasan adalah tentang kebijakan pemerintah Brunei Darussalam terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam. Selain itu, pengaruh sistem pemerintahan yang absolut di tangan Sultan sebagai pemegang kendali utama pemerintahan dan berlimpahnya sumber daya alam dan keuangan negara terhadap kebijakan dan perkembangan kurikulum pendidikan Islam juga menjadi fokus pembahasan. Dalam artikel ini diharapkan nantinya kita bisa mengetahui secara komprehensif tentang sejauh mana kebijakan Brunei Darussalam tentang kurikulum pendidikan Islam dan implikasinya terhadap kemajuan pendidikan Islam di Brunei Darussalam.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis kajian Pustaka (*Library Research*). Kajian pustaka adalah penelaahan terhadap bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek yang sudah dilakukan oleh orang lain. Bahan bacaan dimaksud pada umumnya berbentuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, baik yang belum maupun sudah diterbitkan. (Ratna, 2010).

Penulisan ini menggunakan metode *literature review*. *Literature review* berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran tulisan tentang beberapa sumber pustaka (dapat berupa artikel, buku, slide, informasi, internet dll),

tentang topik yang dibahas. Suatu literature yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Ada lima langkah dalam menggunakan *literature review* yaitu: 1) Mencari literature yang relevan; 2) Memilih sumber yang spesifik; 3) Identifikasi detail artikel; 4) Membuat outline; 5) Menyusun literatur review. (Djamil dkk, 2021 : 178).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan membaca, mencatat, lalu mendeskripsikan dan menyusunnya secara sistematis. Adapun dalam teknik analisis data menggunakan analisis isi (*Content Analysis*). Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari teks (atau materi bermakna lainnya) ke konteks penggunaannya (Krippendorff, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendidikan Islam di Brunei Darussalam

Pendidikan Islam dimaknai sebagai upaya secara menyeluruh yang dapat menciptakan siswa yang tumbuh dan berkembang sebagai umat Islam sesuai Al-Quran dan Hadis dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pendidikan Islam seperti *madrasah* dan sekolah Islam terpadu mulai muncul. Ini sebagai respons terhadap pola pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan di Asia Tenggara, masing-masing negara membentuk pola pendidikan Islam. (Djamil dkk, 2021). Sistem pendidikan di Balai dilaksanakan dua kali untuk pengajian yang bersifat umum dan pengajian yang bersifat khusus. Balai sendiri merupakan sebuah rumah yang disediakan khusus untuk tempat belajar bagi anak-anak. Pengajian umum dilaksanakan untuk masyarakat umum tanpa dibatasi oleh batasan sosial dan umur sedangkan pengajian khusus diikuti oleh masyarakat tertentu seperti pegawai agama, ulama, kadhi, juru nikah dan lainnya. Sistem pendidikan di Balai ini terbatas untuk kalangan laki-laki, sedangkan untuk kalangan perempuan memperoleh pendidikan di rumah-rumah masing-masing. Sistem pendidikan seperti ini terus berlangsung di Brunei Darussalam. Setelah lembaga pendidikan seperti masjid, rumah dan balai berkembang dengan pesat, sistem pendidikan Islam di Brunei Darussalam berubah menggunakan sistem pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah dan dikendalikan oleh Pemerintah dalam hal ini pihak Kerajaan. Walaupun sistem pendidikan formal sudah diberlakukan secara resmi, akan tetapi sistem pendidikan non formal yang diselenggarakan di Masjid, Balai dan tempat lainnya masih terus berjalan.

Lembaga pendidikan Islam formal di Brunei berbentuk sekolah Arab, sekolah agama, tahfizul Quran atau Institut Tahfiz Alquran Sultan Hassanul Bolkiah, Institut Pengajian Islam yang dikelola oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Fakultas Islamic Studies dan Universitas Brunei Darussalam yang dibangun pada tahun 1985 (Daulay : 2009). Lembaga lembaga tersebut terus berkembang baik itu secara infrastruktur, kelembagaan dan sumber daya manusia. Dukungan dan campur tangan Pemerintah kerajaan Brunei dalam pengembangan lembaga lembaga pendidikan Islam tersebut sangat besar dan berpengaruh. Pemerintah Brunei Darussalam sangat konsen terhadap Pendidikan Agama. Bahkan menjadi perhatian yang lebih dari Sultan yang menjadi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Brunei Darussalam.

Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah suku Melayu dan menjadi penganut agama Islam terbesar di Brunei Darussalam. Masyarakat Brunei Darussalam berhaluan pada *Ahl al-Sunnah wal Jama'ah* dan tetap menjaga kelestarian dan mempertahankan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan ajaran keagamaan (Thohir : 2002). Implikasi dari ajaran *Ahl al-Sunnah wal Jama'ah* tersebut maka di Brunei Darussalam sering diadakan kegiatan Hari Besar Keagamaan secara rutin seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj dan kegiatan keagamaan lainnya. Tradisi dan rutinitas tersebut masih terjaga sampai saat ini. Pemerintahan Brunei juga telah membentuk majelis Agama Islam dan Mahkamah Kadi. Majelis tersebut bertugas memberikan nasihat kepada sultan dalam urusan keagamaan terkhusus agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk menjadikan Islam berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei sebagai satu-satunya

ideologi negara dan memastikan syariat Islam berjalan dengan baik (Ridwan : 1994). Hal tersebut semakin kokoh karena masyarakat Brunei adalah Melayu dan memeluk Islam. Bahkan ada kalimat yang sering terdengar bahwa Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu. Pemerintah Brunei juga membentuk lembaga Hal Ehwal Agama yang bertugas menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat luas. Pusat Dakwah Islam juga didirikan pada tanggal 16 September 1985 untuk mengembangkan dan menyebarkan dakwah Islam dan menanamkan nilai-nilai keislaman kepada pegawai pemerintahan dan masyarakat luas. Dengan adanya lembaga tersebut, animo dan antusias masyarakat dalam mempelajari Islam semakin berkembang. Sebagai dampak dari pada itu, kini kuantitas masyarakat Muslim di Brunei semakin hari (Ridwan : 1994).

Kehadiran bangsa Inggris di Brunei Darusalam memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan. Perpaduan antara pola pendidikan Inggris dengan pola pendidikan Brunei mengakibatkan adanya dualisme pendidikan. Akan tetapi, agama Islam yang menjadi agama mayoritas Suku Melayu di Brunei menyebabkan tidak banyak berpengaruh sejak kedatangan Inggris maupun setelah Brunei mendapatkan kemerdekaannya (Aslan dan Suhari : 2019). Hal tersebut merupakan hal yang bisa dipercaya karena Melayu merupakan identitas suku yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman disamping nilai-nilai adat istiadat Melayu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Melayu di Brunei Darusalam.

Sistem Pendidikan di Brunei diatas sedikit banyak memiliki persamaan dengan negara serumpun lainnya seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura, tetapi juga memiliki perbedaan pada tingkat menengah atas yang lebih menekankan pada bahasa Inggris. (Abduh, 2016). Penekanan pada pendalaman Bahasa Inggris inilah menurut hemat penulis yang membedakan dengan di Indonesia. Kedepan tentunya optimalisasi dan penekanan potensi Bahasa Inggris untuk anak didik di Sistem Pendidikan Indonesia harus menjadi perhatian karena Bahasa Inggris merupakan bahasa global dan bahasa internasional.

Selanjutnya siswa yang telah lulus pada tingkat SLTP akan memiliki beberapa pilihan, diantaranya meneruskan ke jenjang SLTA dan melanjutkan ke sekolah Kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik, seni dan kursus yang bisa langsung ke dunia kerja (Abduh, 2016). Di tahun ke dua, setiap siswa akan menjalani ujian penentuan tingkat yang dikenal dengan BCGCE (*Brunei Cambridge General Certificate of Education*) yang mempunyai dua tingkatan yakni AO dan AN. Siswa yang berprestasi baik maka akan mendapatkan ijazah AO sekaligus dapat meneruskan pra-universitas selama dua tahun dan akan mendapatkan ijazah *Brunei Cambridge Advanced Level Certificate tingkat AA*.

### **Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Brunei Darusalam**

Prioritas utama pemerintah kerajaan Brunei Darusalam dalam pendidikan adalah pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi. Peningkatan sektor pendidikan juga diarahkan ke pendidikan teknik dan kejuruan. Program pendidikan juga diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama serta menguasai teknologi. Dalam hal ini, Pendidikan Islam mempunyai peran yang signifikan dan mewarnai sistem pendidikan yang ada. Pemerintah juga telah menetapkan 3 bidang utama di bidang pendidikan yaitu sistem dwi bahasa di semua sekolah, Konsep Melayu Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah dan peningkatan serta pengembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasi (*Life skill*) (Bani: 2008).

Konsep atau sistem dwi bahasa sendiri merupakan kewajiban menggunakan dua bahasa utama yaitu bahasa Melayu dan Bahasa Inggris dalam sistem pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari di Brunei Darusalam. Bahasa Melayu digunakan sebagai upaya mempertahankan bahasa melayu sebagai identitas kemelayuan warga negara. Sedangkan Bahasa Inggris digunakan sebagai komunikasi lintas sektoral karena Bahasa Inggris merupakan bahasa global dan internasional sehingga dapat memperkuat daya saing dalam berbagai bidang. Konsep Melayu Beraja (MIB) merupakan falsafah kebangsaan Negara Brunei Darusalam yang diperkenalkan oleh Sultan Haji Hassanah Bolkiah pada 1 Januari 1984 tepat dihari Kemerdekaan Negara Brunei

Darusalam. Konsep ini mempertemukan antara Melayu sebagai identitas asli masyarakat dengan pengamalan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan Melayu dan Islam sebagai agama resmi negara dengan mazhab Ahlu Sunnah Wal Jama'ah serta Sistem beraja yang merupakan sistem tradisi Melayu yang sudah lama ada sejak pemerintahan kesultanan Brunei yaitu sultan Brunei yang pertama Sultan Muhammad Shah.

Adapun yang menjadi cakupan atau bahasan dalam Melayu Islam Beraja (MIB) tersebut diantaranya yaitu tentang ciri-ciri ras melayu, bahasa melayu, kedatangan dan pengaruh Islam, institusi monarki, tradisional kebiasaan dan tentang hukum (Asbol : 2019). Sedangkan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan program pendidikan yang berupaya menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai potensi masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia juga diarahkan pada bidang kejuruan (Vocasional).

Pendidikan formal di Negara Brunei Darussalam mulai diperkenalkan pada Tahun 1914 dengan memberikan dasar bagi anak-anak Melayu untuk dapat membaca dan menulis. Setelah itu, sistem Pendidikan di Brunei Darusalam telah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Sebelum Brunei Darusalam memerdekakan diri menjadi negara merdeka pada 1 Januari 1984, setidaknya ada empat dasar pendidikan dalam rentang tahun 1950 – 1984 yang telah dikembangkan yaitu Dasar Pendidikan 1954, Dasar Pendidikan Negara 1962, Dasar Pendidikan 1972 dan Dasar Dwibahasa 1984. Dasar Pendidikan atau kurikulum tersebut menjadi pijakan utama dalam sistem pendidikan di Brunei Darusalam. Dasar atau aturan pendidikan di Brunei dikeluarkan secara resmi pada tahun 1954 dengan memberikan pendidikan kepada semua orang Melayu di sekolah Melayu, Inggris, atau Vokasional dari tingkat rendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi di luar negeri untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia yang terpelajar dan profesional dalam berbagai bidang keilmuan.

Setelah Dasar Pendidikan 1962 kurang mendapatkan hasil yang diharapkan setelah 10 Tahun pelaksanaan, maka lahirlah Dasar Pendidikan 1972. Pada dasarnya, isi Dasar Pendidikan 1972 tidak banyak berbeda dengan Dasar Pendidikan Negara 1962. Keduanya menekankan agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah di Brunei, menyatukan sistem pendidikan, memenuhi keperluan tenaga manusia dan melahirkan generasi yang taat dan setia kepada sultan dan negara. Perbedaannya, Dasar Pendidikan 1972 mencoba untuk menonjolkan sisi pendidikan Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang penting dan wajib untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Setelah Brunei mencapai kemerdekaan pada 1 Januari 1984, kerajaan telah melahirkan satu lagi dasar atau kurikulum pendidikan baru pada 9 April 1984 yaitu Dasar Pendidikan Dwibahasa 1984. Kurikulum ini mengutamakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran di sekolah (Haji Jibah, 1983; dan Asbol bin Haji Mail, 2006).

Setelah itu, pada tahun 2002, Kementerian Pendidikan Brunei Darusalam telah memperkenalkan sebuah sistem Pendidikan terbaru yaitu Sistem Pendidikan Bersepadu dengan dasar menggabungkan mata pelajaran umum dan agama yang diolah dalam satu jadwal waktu serta dikendalikan semuanya oleh Kementerian Pendidikan (sebelumnya, Kementerian Pendidikan mengendalikan mata pelajaran umum dan Kementerian Hal Ehwal Ugama mengendalikan mata pelajaran agama). Hal ini sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ismail Suardi Wekke & Maimun Aqsha Lubis (2011) yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama. Filosofi pendidikan yang ada didalam Kurikulum terpadu diantaranya adalah penanaman identitas "Monarki Islam Melayu" pada rakyat Brunei. Unsur keislaman ilmu `Aqly dan Naqly menjadi penting dan berguna sebagai pedoman dalam mencapai cita-cita tersebut. Desain kurikulum harus terintegrasi dan kompatibel dengan tantangan dan perkembangan zaman (Muhammad & Bakar: 2013). Seiring dengan berjalannya waktu, Sistem Pendidikan Bersepadu akhirnya gagal dan diganti dengan sistem yang baru. Pada tahun 2009, Kementerian Pendidikan Brunei Darusalam telah memperkenalkan satu lagi sistem pendidikan negara yang dipanggil sebagai Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 (SPN 21) yang diharapkan akan melahirkan sumber daya manusia yang berdasarkan tujuan yang dicita

dicetak oleh Kerajaan atau negara.

### **Pelaksanaan Kurikulum SPN 21 di Brunei Darussalam**

Sistem Pendidikan Negara Abad ke- 21 atau SPN 21 telah mulai diperkenalkan pada tahun 2008 menggantikan Sistem Pendidikan Bersepadu yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan pada masa itu yaitu Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Awang Haji Abd Aziz bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Awang Haji Umar. Sistem Pendidikan Negara Abad ke- 21 ini dilaksanakan sepenuhnya pada tahun berikutnya setelah peresmian secara resmi pada 5 Januari 2009 dan telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan pada waktu itu yaitu Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Rahman. (Haji Tengah, 2013).

Peresmian secara resmi tersebut menjadikan Sistem Pendidikan Negara Abad ke- 21 atau SPN 21 berlaku secara menyeluruh di seluruh distrik dan wilayah Kerajaan Brunei Darussalam. Sistem Pendidikan Negara abad ke-21 diperkenalkan sebagai salah satu perubahan paradigma dan mengkokohkan kembali negara Brunei sebagai sebuah 'Negara Melayu Islam Beraja' dan implementasi konsep Negara Zikir untuk mencapai Wawasan 2035 yang memfokuskan tiga perkara utama yaitu rakyat yang berpendidikan, berkemampuan tinggi dan berjaya serta kehidupan rakyat yang berkualitas, ekonomi yang dinamis dan berdaya saing (Masuriyati & Zarrina : 2015).

Menurut dokumen Kerangka dan Panduan bagi Kurikulum dan Penilaian SPN21 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam, Ruang lingkup Kurikulum SPN 21 adalah meluas, seimbang, relevan dan berdasarkan keperluan pelajar demi memberi peluang untuk mereka terus maju dalam pembelajaran. Kurikulum ini lebih bersifat responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia global dan ekonomi. Ia berlandaskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang bersumber dari keperluan pelajar secara individu disamping menyediakan ruang yang optimal untuk pelajar mencapai kemajuan. (Haji Tengah, 2013). Jadi bisa diartikan bahwa kurikulum ini menghendaki agar pelajar atau siswa menjadi objek untuk berkreatifitas dan berinovasi sesuai potensi yang dimiliki. Potensi pelajar harus terus dikembangkan dan diasah secara berkesinambungan dan terukur.

Kurikulum SPN 21 menjadikan pelajar sebagai pusat (*student centered*) sekaligus menjadi sasaran utama kurikulum, menjadi fokus pengajaran dan pembelajaran yang disesuaikan dengan keperluan dan gaya belajar setiap pelajar untuk memberikan ruang mereka melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Yang kedua, Kurikulum SPN 21 menghendaki adanya pembinaan perkembangan pelajar secara menyeluruh dengan menekankan kepada pengetahuan, kefahaman, kemahiran asas serta sikap dan nilai. Perspektif lain, kurikulum ini dapat memberikan pendidikan yang seimbang dengan menyediakan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman pembelajaran yang meluas (Haji Tengah, 2013). Tujuan yang ingin dicapai oleh Kurikulum atau Sistem Pendidikan Negara abad ke-21 tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan paradigma, cara pandang dan mental ditengah tengah persaingan global yang semakin meningkat.

Pendekatan memusatkan pembelajaran dan pengajaran kepada pelajar dalam SPN 21 merupakan hal yang berbeda dengan sistem lama yang menggunakan pendekatan *examination oriented*. Pendekatan *examinataion oriented* memberi imbas kepada guru-guru untuk mengulang kaji menggunakan kertas soal pemahaman konsep-konsep tertentu yang lebih penting untuk dijelaskan dan dipahami kepada para pelajar. Dalam Kurikulum SPN 21 ini, Pemerintah juga ingin mengubah sistem penilaian dari acuan norma menjadi acuan kriteria untuk menekankan penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Untuk mencapai tujuan menyeluruh kurikulum SPN21, ujian sumatif sekolah dan pendidikan guru mungkin perlu mendapat perhatian dan inovasi yang menyeluruh (Mundia : 2010). Kerangka kurikulum SPN 21 yang disediakan oleh Jabatan Kurikulum Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam memenuhi tiga persoalan utama yaitu

apa yang akan dicapai, bagaimana pembelajaran diatur dan sejauh mana tujuan tercapai. Persoalan ini dirangkum melalui sembilan hal, yaitu:

1. Misi Kementerian Pendidikan untuk menyediakan pendidikan secara holistik untuk mencapai potensi yang sepenuhnya;
2. Membentuk pelajar yang mampu meningkatkan pencapaian pelajar, mengembangkan kemampuan pembelajaran sepanjang hayat dan menyediakan pelajar yang berkemampuan tinggi;
3. Tiga tema strategik yang harus dicapai yaitu organisasi yang profesional, bertanggungjawab dan efisien, pendidikan berkualitas dan kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran;
4. Fokus pembelajaran yaitu pengetahuan, kemahiran asas, sikap dan nilai;
5. Materi pembelajaran adalah pengetahuan agama Islam, pendidikan kenegaraan, bahasa, matematik, sains, pendidikan jasmani dan kesehatan, sains kemasyarakatan dan kemanusiaan, teknologi, dan kesenian dan kebudayaan;
6. Hasil pembelajaran berfokus kepada apa yang pelajar ketahui dan dapat lakukan setelah mempelajari;
7. Penilaian dibuat melalui tiga bentuk penilaian, yaitu penilaian mandiri, penilaian pembelajaran, dan penilaian pencapaian;
8. Pembelajaran pra-sekolah, rendah, dan menengah adalah bersifat integrasi, tematik, topikal, inklusif, berasaskan konteks dan pengkhususan
9. Mekanisme pemantauan yang komprehensif dan sistematik. (JPK, 2009).

Model kurikulum ini juga berpijak pada perspektif Tauhid sebagai cara untuk mengembangkan siswa yang berprestasi dan seimbang melalui keterpaduan dari segi intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan perkembangan fisik. Dengan demikian, diharapkan pendidikan masa depan pola dapat direncanakan dengan cara ini. Alasan pemilihan model tersebut adalah untuk:

1. Memantapkan keseimbangan dan integrasi pendidikan yang didirikan di atas pengetahuan yang terungkap.
2. Menyediakan kurikulum pendidikan yang dikategorikan *fard`Ain* dan *ilmu fard kifayah*, sehingga menonjolkan prinsip integrasi kehidupan dunia sekarang dan akhirat.
3. Menyediakan kurikulum pendidikan akademik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan akademik, profesional dan komprehensif.
4. Mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan menghasilkan warga negara yang peka, inovatif dan tanggap terhadap arus perkembangan dalam memenuhi kebutuhan masa depan.
5. Menanamkan dan menumbuhkan kesadaran akan konsep pendidikan sepanjang hayat.
6. Menghasilkan siswa yang berkepribadian Al-shumūl (berwawasan), Al-tawāzun (seimbang), dan Al-takāmul (terpadu).
7. Membentuk pribadi yang unggul, beriman dan bertaqwa yang berjuang untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Meningkatkan dan mempertahankan identitas Brunei serta mengembangkan kepribadian sederhana berdasarkan filosofi nasional "*Melayu Monarki Islam.*" (Norhazlin & Bakar : 2013).

### **Kurikulum Pendidikan dan Visi / Wawasan Brunei Tahun 2035**

Visi atau wawasan Brunei 2035 merupakan dokumen arah pembangunan Brunei Darussalam yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Brunei Darussalam Sultan Hasanah Bolkiah. Ide ini dimulai pada Tahun 2004 ketika Sultan Hasanah Bolkiah menyetujui pembentukan Dewan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang yang bertugas untuk membentuk visi masa depan Brunei Darussalam dan menyajikan laporan terperinci persyaratan teknis, keuangan dan strategis yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dewan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang bertugas mengidentifikasi aspirasi kolektif masyarakat Brunei untuk menjaga

stabilitas politik di Brunei Darussalam; melestarikan nilai-nilai sosial, budaya, spiritual, dan sejarah; untuk membantu orang memenuhi tantangan praktis dunia modern dengan sukses dan memberikan kepercayaan keluarga dan masyarakat di masa depan. Rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2007 ini memuat visi ke depan yang dapat memenuhi harapan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi jangka panjang yang disusun dikenal dengan Wawasan Brunei 2035. Visi ini mencita-citakan bahwa pada tahun 2035, Brunei Darussalam berkembang menjadi negara yang akan diakui secara luas atas pencapaian orang-orangnya yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi yang diukur dengan standar internasional tertinggi; kualitas hidup yang termasuk dalam 10 negara teratas di dunia dan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan dengan pendapatan per kapita dalam 10 negara teratas di dunia. Pada tahun 2014 telah dibentuk Majelis Tertinggi Wawasan Brunei 2035 yang berfungsi memberikan dukungan intensif dan sistematis terhadap pelaksanaan inisiatif oleh instansi pemerintah untuk mewujudkan hasil Wawasan Brunei 2035. Majelis Tertinggi Wawasan Brunei 2035 juga bertugas merealisasikan tiga belas (13) strategi aspek pembangunan Brunei Darussalam yang harus dilaksanakan dengan tepat dan efektif yaitu pendidikan, ekonomi, keamanan, pengembangan kelembagaan, pengembangan bisnis local, pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, lingkungan, kesehatan, agama, tata guna lahan, infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi, dan perencanaan tenaga kerja. Pendidikan mendapatkan porsi yang pertama dan utama dalam pencapaian wawasan 2035 Brunei Darussalam. Oleh karena itu, sinergitas dan pembenahan bidang pendidikan juga menjadi fokus dan perhatian yang cukup besar dari pemerintah Brunei Darussalam. Perbaikan dan modernisasi kurikulum pendidikan di Brunei Darussalam tentunya selaras dan beriringan dengan visi atau wawasan Brunei Tahun 2035.

## SIMPULAN

Sistem dan pengelolaan pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam di Brunei Darussalam dikelola dan dikendalikan oleh Pemerintah. Kebijakan pemerintah Brunei Darussalam terhadap kurikulum pendidikan Islam harus berpatokan dan berlandaskan pada 3 (tiga) bidang utama dalam pendidikan yaitu sistem dwi bahasa di semua sekolah, konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah dan peningkatan serta pengembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasi (Kejuruan). Komitmen dan *political will* pemerintah Brunei Darussalam luar biasa tinggi terutama pada soal pendidikan agama Islam atau diniyah. Semua jenjang pendidikan wajib menerapkan agama sebagai basis pembelajaran. Selain itu, dukungan pendanaan pendidikan akibat sumber daya alam dan kekayaan negara yang melimpah menjadi salah satu faktor kebijakan dan pengelolaan Pendidikan Islam khususnya pengelolaan dan pelaksanaan Kurikulum pendidikan Islam di Brunei Darussalam bisa terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aslan & Suhari. (2019). *Sejarah Kurikulum Pendidikan Islam di Brunei Darussalam*. Jurnal Iqro E-ISSN: 2548-7892 & P-ISSN: 2527-4449 Volume 4, Issue 1, June. 113 – 127.
- Asbol bin Haji Mail, Haji. (2019). *Melayu Islam Beraja' The Malay Islamic Monarchy In Negara Brunei Darussalam Prior To 1906: A Historical Study*, Bandar Seri Begawan : Brunei Historical Society.
- Asbol bin Haji Mail, Haji. (2006). *Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei, 1950 – 1985*, Bandar Seri Begawan: Pusat Sejarah Brunei.
- Bani, Suddin. (2008). *Perkembangan Pendidikan Islam di Brunei Darussalam*. Jurnal Lentera Pendidikan Islam Vol 11 No. 2 Desember. 270–283.
- Daulay, Haidar Putra. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Djamil, Nasrullah. Dkk. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Negara Yang Dilanda Konflik: Studi Kasus Di Pattani Thailand*. Jurnal El-Riyasah, Volume 12 Nomor 2. 171–187.
- Haji Tengah, Ampuan Haji Brahim bin Ampuan. (2013). *Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21: Isu dan Cabaran*

- di Brunei Darussalam. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*. 197–208.
- Haji Jibah, Matassim. (1983). *Perkembangan Persekolahan Melayu di Brunei dalam Pentabiran Sistem Residen, 1906-1959* dalam *The Brunei Museum Journal*, Vol.5, No.3.
- JPK [Jabatan Perkembangan Kurikulum]. (2009). *Kerangka dan Panduan bagi Kurikulum dan Penilaian Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21*. Bandar Seri Begawan: Jabatan Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam.
- Krippendorff, Klause. (2004). *Content Analysis; An Introduction to Its Methodology*. London, Sage Publications.
- Lubis, Maimun Aqsha, dkk. (2009). *Integrated Islamic Education in Brunei Darussalam: Philosophical Issues and Challenges*. *Journal of Islamic and Arabic Education* 1(2) 51-60
- Mundia, Lawrence, (2010). *Implementation of SPN21 Curriculum in Brunei Darussalam: A Review of Selected Implications on School Assessment Reforms*. *Jurnal International Education Studies*. Vol. 3, No. 2; May. 119-129.
- Muhamad, Norhazlin binti Pg Haji & Bakar, Dato Osman. (2013), *Implementation of the "Integrated Education System" in Brunei Darussalam: Issues and Challenges*, *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 7:4, 97-120.
- Maunah, Binti. (2011). *Perbandingan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Teras.
- Masuriyati & Zarrina, Che. (2015). *Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 Brunei Darussalam dalam melestari Ketamadunan Islam Negara Zikir: Cabaran dan Harapan*. *Jurnal Afkar* 16. Januari-Juni. 61 – 92.
- Norhazlin binti Pg Haji Muhammad dan Dato Osman Bakar (2013). *Implementation of the "Integrated Education System" in Brunei Darussalam: Issues and Challenges*, *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)* Vol.7.
- Ridwan, Kafrawi. (1994). *Ensiklopedia Islam*, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet. III.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian; Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Thohir, Ajid. (2002). *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wekke, Ismail Suardi & Lubis, Maimun Aqsha. (2011). *Educational Technology On Teaching and learning of Integrated Islamic Education in Brunei Darussalam*. *Jurnal Ulumuna*, Volume XV Nomor 1 Juni. H. 185-204.